

PENGEMBANGAN KAWASAN PERCONTOHAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS SEKTOR PARIWISATA TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN SUMATERA UTARA

Aditya Yuwana Nawing¹⁾, Humaera Silvia Maristy²⁾

^{1, 2)} Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti (AKPARDA) Yogyakarta

e-mail: aditya.nawing@gmail.com¹⁾, humaera.silvia90@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Pembangunan kawasan ekonomi inklusif berbasis pariwisata di Wilayah Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui pariwisata, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas dengan mendorong pusat pertumbuhan pariwisata, unit-unit usaha pariwisata, UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di destinasi pariwisata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah persiapan, pengumpulan data, analisis dan keluaran. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur/review, wawancara, dan survey lapangan yang dilaksanakan dengan cara penyebaran kuesioner bagi wisatawan dan pelaku usaha pariwisata yang menjadi objek studi baik dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan upaya pengembangan sektor pariwisata, yang dapat diadaptasikan dalam pengembangan kegiatan “ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata” yang sesuai dengan karakteristik kawasan. Hasil dari penelitian ini yaitu perencanaan program terpadu yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku wisata, pengembangan asosiasi usaha pariwisata, standarisasi dan sertifikasi usaha dan pelaku usaha pariwisata yang meliputi standarisasi usaha akomodasi, restoran/rumah makan, kerajinan, dan sertifikasi pemandu wisata, untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha wisata, sehingga dapat terciptanya rasa percaya diri serta kemampuan yang memadai untuk dapat melayani wisatawan dan berkompetisi dengan pelaku usaha wisata lainnya.

Kata Kunci: ekonomi inklusif, usaha wisata, pelaku usaha, standarisasi dan sertifikasi

ABSTRACT

The development of inclusive economic zones based on tourism in the Teluk Dalam Region, South Nias Regency, North Sumatra is expected to reduce income inequality and poverty alleviation through tourism, so that it can contribute to society at large by encouraging tourism growth centers, tourism business units, UMKM, and employment in tourism destinations. The research method used in this study consisted of the steps of preparation, data collection, analysis and output. Data analysis uses descriptive qualitative analysis. Data collection is carried out through literature studies / reviews, interviews, and field surveys carried out by distributing questionnaires to tourists and tourism businesses that are the object of study both from the external environment and the internal environment that are directly or indirectly related to efforts to develop the tourism sector, which can be adapted to the development of "tourism-based economic inclusive activities" in accordance with regional characteristics. The results of this study are integrated program planning carried out with the aim to improve the competitiveness and welfare of tour operators, the development of tourism business associations, standardization and certification of businesses and tourism businesses that include standardization of accommodation businesses, restaurants / restaurants, handicrafts, and certification of guides tourism, to improve the performance of tourism businesses, so as to create self-confidence and adequate ability to be able to serve tourists and compete with other tourism businesses.

Keywords: inclusive economy, tourism businesses, business actors, standardization and certification.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi wisata yang sangat besar berupa potensi wisata alam berupa pantai serta wisata budaya yang unik ditambah dengan kerahmanan penduduk yang ada di sekitar destinasi wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pantai Sorake yang menjadi salah satu lokasi surfing terbaik di dunia, dan kekayaan budaya peninggalan zaman megalitikum di desa-desa adat yang ada di Kabupaten Nias Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Beberapa kelemahan yang masih terlihat jelas pada pengembangan potensi wisata adalah berupa keterbatasan pelaku wisata dalam mengakses sumber pendanaan untuk pengembangan usaha pariwisata, rendahnya sumber daya

manusia dalam hal pengembangannya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata, seperti akomodasi, rumah makan, transportasi wisata, cinderamata, serta tidak terintegrasinya para pelaku wisata sehingga menjadikannya daya tarik wisata yang potensial tidak terjual dengan optimal. Untuk itu diperlukan “Strategi pengembangan objek wisata ke arah yang lebih maju. Dalam strategi pengembangan diperlukan identifikasi kelengkapan unsur-unsur pariwisata dalam menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga dapat dilakukan strategi yang tepat dalam pengembangan” (Delita et al., 2017).

Pemberdayaan pelaku usaha wisata yang dilakukan selain memberi pemahaman pentingnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha mereka, serta pembentukan organisasi untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha wisata, usaha pariwisata harus distandarasi, baik standarisasi usaha akomodasi, restoran/rumah makan, kerajinan, dan sertifikasi pemandu wisata. Mengingat tahun 2015 Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan segala konsekuensinya, seperti kemungkinan adanya pelaku usaha wisata dari ASEAN yang akan membuka usaha di Nias Selatan, maka upaya meningkatkan kualitas usaha dan profesionalisme semua pelaku usaha wisata harus mulai disosialisasikan dalam tahun 2016, dan mulai direalisasikan tahun 2017. Beberapa rencana kegiatan telah dicantumkan dalam rencana aksi pengembangan, seperti pelatihan dan standarisasi produk dan jasa wisata dalam kegiatan pengembangan produk wisata yang berdaya saing, serta kegiatan pemberdayaan pelaku usaha wisata. Namun demikian, kegiatan standarisasi dan sertifikasi adalah kegiatan khusus yang memerlukan upaya bersama dan bersifat strategis. Standarisasi/ sertifikasi usaha dan pelaku pariwisata di Nias Selatan membutuhkan proses yang panjang.

Pada tahap awal diperlukan upaya sosialisasi kepada segenap pelaku usaha wisata bahwa Indonesia telah memasuki era MEA yang mengharuskan pelaku usaha wisata dapat meningkatkan kualitas usaha dan bekerja secara profesional, atau para pelaku usaha wisata di Nias Selatan akan semakin tertinggal dan tergerus oleh persaingan yang bersifat regional. Selanjutnya adalah menjelaskan tahapan standarisasi/sertifikasi untuk empat bidang usaha pariwisata (pramuwisata, akomodasi, restoran, dan kerajinan) yang diikuti dengan pelatihan secara intensif untuk mempersiapkan diri dalam program standarisasi/sertifikasi.

Tahap terakhir adalah proses ujian dan memperoleh standarisasi/ sertifikasi. Dengan memiliki usaha yang telah terstandarisasi dan menjadi pramuwisata yang tersertifikasi, akan sangat mendukung promosi pariwisata di Nias Selatan. Pada satu sisi usaha pariwisata yang sudah terstandarisasi akan menjadi nilai tambah untuk melayani wisatawan mancanegara, dan mereka lebih yakin akan kualitas jasa yang diterima saat berwisata.

Disisi lain pelaku yang sudah tersertifikasi juga mempunyai rasa percaya diri serta kemampuan yang memadai untuk dapat melayani wisatawan dan berkompetisi dengan pelaku usaha wisata lainnya. Pemerintah dan perangkat SKPD terkait juga sangat diuntungkan dengan banyaknya usaha dan pelaku usaha wisata yang terstandarisasi dan tersertifikasi, karena akan memudahkan koordinasi dengan pelaku usaha wisata yang profesional dan berorientasi melayani konsumen, meningkatkan promosi wisata Nias Selatan ke mancanegara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting, karena “Pariwisata berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya” (Sutjipto, 2014), dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan

kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tertumpunya harapan tersebut maka “Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang baru, yakni pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berpihak pada aspek sosial” (Syaparuddin & Artis, 2017), yang hanya dapat diwujudkan dalam pendekatan pembangunan inklusif.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan ekonomi inklusif berbasis pariwisata yang dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui pariwisata, sebagai salah satu lokasi yang direncanakan menjadi model kawasan ekonomi inklusif, menurut Hill, Khan, dan Zhuang sehingga dapat terwujudnya “pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (*green growth*), sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda” (Hill, Khan, dan Zhuang, 2012 dalam Siwage Dharma Negara, 2013). Dengan demikian pembangunan kawasan ekonomi inklusif berbasis pariwisata, Teluk Dalam, Nias Selatan – Sumatera Utara, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas dengan mendorong pusat pertumbuhan pariwisata, unit-unit usaha pariwisata, UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di destinasi pariwisata.

Kontribusi devisa pariwisata memperlihatkan bahwa pariwisata menjadi salah satu penghasil devisa yang penting secara nasional. Besarnya pendapatan dari kegiatan pariwisata tersebut tentunya akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, guna lebih mengoptimalkan dampak kontribusi tersebut, tentunya sangat dibutuhkan dukungan pemerintah selaku fasilitator sekaligus penggerak bagi keberhasilan kegiatan kepariwisataan. Hal ini pada akhirnya akan membentuk pendapatan domestik bruto yang maksimal yang akan sangat bermanfaat bagi pembangunan intersektoral di daerah. Disamping itu juga menurut Uphoff dan Cohen, diperlukan adanya peran “para pelaku pengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang non pemerintah untuk berpartisipasi secara penuh (dalam pengambilan keputusan) baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, memanfaatkan, maupun dalam melakukan pengawasan, evaluasi, atau kontrol” (Uphoff dan Cohen, 1979 dalam Setiawan, 2016).

Terkait dengan kepariwisataan, komponen pariwisata pada destinasi yang dapat diamati adalah: (a) Komponen daya tarik wisata “merupakan elemen paling penting dari sebuah produk pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata terus dipacu dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat. Untuk mencapai hal ini, maka pilihan pembangunan pariwisata dengan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat di suatu area yang nyaris tersembunyi adalah merupakan satu tantangan tersendiri” (Hindersah et al., 2017), yang mencakup keunikan (*uniqueness*), kekhasan

(*speciality*), kelokalan (*locality*), dan keaslian (*authenticity*), (b) Komponen aksesibilitas yaitu ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dari daerah asal wisatawan ke destinasi terkait. (c) Komponen fasilitas pendukung (*amenitas*) yang mencakup akomodasi, restoran/rumah makan, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan aneka jasa pelayanan pariwisata lainnya.

Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya, sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*), yaitu dapat dilakukan melalui “Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pembangunan di sektor pariwisata sebagai salah satu solusi alternatif untuk mengurai masalah kemiskinan. Karena, pariwisata mempunyai dampak pengganda yang besar” (Risman et al., 2016), yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Menurut (Artis, 2018), “Dalam tataran yang lebih luas pengembangan sektor pariwisata akan berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif yang juga telah menjadi ikon utama untuk menjamin keberlanjutan proses pertumbuhan ekonomi”. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu (pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya).

Pariwisata yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan usaha mampu membangkitkan Dampak Ekonomi Multi Ganda (*multiplier effect*) yang sangat signifikan bagi tumbuhnya mata rantai usaha lintas skala, terutama UKM sehingga membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, artinya pariwisata memberikan banyak peluang usaha pula kepada masyarakat, termasuk kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selain menjadi tenaga kerja, masyarakat di sekitar kawasan wisata dapat pula menjadi pelaku pengembangan usaha diantaranya dalam bentuk pembuatan dan/atau penjualan cinderamata, usaha kuliner lokal, supplier bahan baku makanan, dan sebagainya. Menurut Muhammad (2018), “Pariwisata sudah menjadi trend baru dalam peningkatan ekonomi suatu negara. WTO melihat bahwa prospek pariwisata ke depan semakin cerah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 10,3 persen pada 2030”.

Sebagaimana paradigma dasar dari konsep pembangunan ekonomi secara inklusif, menurut Warsilah (2015) “Pada umumnya melakukan strategi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara proaktif, maka pendekatan pembangunan inklusif (PI) mensyaratkan peran aktif masyarakat dan mendukung peran aktif masyarakat sipil”, dalam hal ini, Pengembangan Kawasan Percontohan Ekonomi Inklusif Berbasis sektor pariwisata Wilayah Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara, diperlukan adanya perencanaan dan sebuah model usaha pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dan berpenghasilan rendah, sehingga pengembangan dan pengelolaan usaha pariwisata secara strategis dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik dan keunggulan wisata di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujudnya sasaran pengembangan sebagai berikut:

- 1) Terpetakannya iklim usaha di kawasan pariwisata, meliputi: jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset dan daya saing usaha, dan kelembagaan usaha;
- 2) Terpetakannya permintaan pasar (*demand*) pariwisata yang belum tersedia di daerah studi;
- 3) Teranalisisnya potensi, permasalahan, dan isu strategis pengembangan bisnis inklusif berbasis sektor pariwisata;
- 4) Terciptanya sebuah rencana dan prospek usaha pariwisata yang inklusif yang menggambarkan secara lengkap rencana pengembangan bisnis dan nilai ekonomi yang ditargetkan;
- 5) Terlaksananya proses inkubasi usaha dari masyarakat lokal dan berpenghasilan rendah. Proses inkubasi ini diharapkan juga dapat menghasilkan sebuah embrio bisnis yang akan dikembangkan;

Terwujudnya sebuah komersialisasi dari usaha yang dikembangkan sehingga produk yang dihasilkan dapat terinformasikan dengan baik kepada target pasar yang tepat. Proses komersialisasi ini meliputi dari perumusan konsep produk, pembuatan *brand*, dan metode pemasaran (*selling*).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah persiapan, pengumpulan data, analisis dan keluaran. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur/review, wawancara, dan survey lapangan yang dilaksanakan dengan cara penyebaran kuesioner bagi wisatawan dan pelaku usaha pariwisata yang menjadi objek studi baik dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan upaya pengembangan sektor pariwisata, yang dapat diadaptasikan dalam pengembangan kegiatan “ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata” yang sesuai dengan karakteristik kawasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Arah kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Percontohan Ekonomi Inklusif

Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Percontohan Ekonomi Inklusif Berbasis Pariwisata Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara

No	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan
1	Pengembangan produk usaha pariwisata	Standarisasi produk
2	Peningkatan promosi wisata	a. Pengembangan promosi berbasis teknologi informasi b. Pengembangan infrastruktur promosi produk wisata
3	Pemberdayaan pelaku usaha wisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha wisata melalui edukasi, motivasi berprestasi, dan keahlian pengelolaan usaha
4	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	Penyediaan sistem teknologi informasi dan informasi

		basis data produk wisata serta edukasi
5	Peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah membangun infrastruktur pendukung usaha pariwisata	Peningkatan kualitas akses, energi listrik dan pendukung wisata, seperti TIC, toko souvenir/cinderamata, tenda kuliner, dll
6	Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha wisata, pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan asosiasi usaha	a. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan forum komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan wisata b. Peningkatan program kemitraan pelaku usaha wisata dengan pemangku kepentingan wisata
7	Pengembangan iklim usaha wisata	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha wisata dan kemitraan usaha
8	Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha wisata	a. Pembentukan dan pengembangan koperasi pelaku usaha wisata b. Peningkatan akses permodalan pada lembaga keuangan

(Sumber: hasil analisis peneliti, 2015)

4.2. Mengadakan Program Terpadu

Program terpadu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku wisata dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif pariwisata di Nias Selatan. Tahapan program terpadu tersebut adalah:

- 1) **TAHAP 1:** Pelatihan untuk membuka wawasan dan mengubah *mindset* (penyadaran) pelaku wisata, dengan tujuan:
 - a. Menyadarkan masyarakat Nias Selatan akan terbatasnya sumber daya alam (tempat surfing dll) dan sumber daya budaya (desa wisata dll) yang tidak bisa dikonsumsi sekaligus.
 - b. Menyadarkan akan perlunya pelaku wisata untuk tidak terus pada pola pikir lama dan rasa puas diri yang berlebihan.
- 2) **TAHAP 2:** Pelatihan *creative thinking* kepada para pelaku wisata, dengan tujuan:
 - a. Melatih cara berpikir pelaku wisata untuk keluar dari *comfort zone* dan melihat peluang-peluang usaha di bidang pariwisata yang baru
 - b. Memotivasi pelaku wisata bahwa mereka dapat melakukan kreativitas yang berorientasi pada keinginan konsumen dan perkembangan jaman (misal: membuat tempat ponsel dari kayu dll)
- 3) **TAHAP 3:** Pelatihan pembuatan Business Plan bagi para pelaku wisata, dengan tujuan:
 - a. Melatih pelaku wisata membuat *business plan* yang rasional disertai dengan kemungkinan realisasi serta keberhasilan rencana tersebut yang meliputi aspek pemasaran, keuangan, produksi, dan perekrutan tenaga kerja lokal.
- 4) **TAHAP 4:** Penilaian proposal *Business Plan* yang masuk dan pemilihan Business Plan terbaik, dengan tahapan penilaian:

- a. Menetapkan Dewan Juri, yang terdiri dari unsur-unsur: Konsultan, Pemerintah Daerah/Dinas Pariwisata, Tokoh Masyarakat, dan Wisatawan.
 - b. Menetapkan kriteria penilaian, yang meliputi: tenaga kerja yang akan dilibatkan, kelayakan usaha secara ekonomis, prospek keberhasilan usaha.
 - c. Pemenang yang ditetapkan adalah 1 unit usaha untuk setiap desa yang dijadikan percontohan.
- 5) **TAHAP 5:** Pembuatan Modul Produksi sesuai dengan Business Plan, dengan tujuan:
- a. Membuat modul-modul untuk melakukan sebuah kegiatan produksi (barang dan jasa) sesuai dengan *Business Plan* yang telah dibuat.
 - b. Modul diarahkan pada bidang usaha spesifik yang telah ditetapkan, yakni bidang Akomodasi, Bidang Restoran, bidang Pramuwisata, dan bidang Kerajinan tangan.
- 6) **TAHAP 6:** Standarisasi Produksi dan Sertifikasi Pelaku Wisata, dengan tujuan:
- a. Melakukan standarisasi produk yang dihasilkan oleh bidang wisata kerajinan kayu, batu, dan bahan lainnya.
 - b. Melakukan standarisasi produk dan layanan pada bidang usaha akomodasi (*homestay*) dan usaha restoran (menu makanan dll)
 - c. Melakukan sertifikasi pada para pramuwisata, baik pada tingkat nasional atau internasional.
- 7) **TAHAP 7:** Modul Distribusi, dengan tujuan:
- a. Membuka peluang-peluang untuk mendistribusikan produk kerajinan yang telah dihasilkan.
 - b. Mendistribusikan produk lewat beragam saluran pemasaran, seperti lewat pembangunan *souvenir center* di bandara atau di tengah kota, membuat website, melakukan *network* dengan pembeli dari luar, mengikuti beragam *event marketing* di tingkat nasional.
- 8) **TAHAP 8:** Komersialisasi usaha inkubasi yang telah dibentuk, dengan tujuan:
- a. Membuat merek (*brand*) dan melakukan strategi *branding*.
 - b. Membuat strategi pemasaran (*segmentasi-targeting-positioning*) produk dan merek.
 - c. Membuat bauran pemasaran (*product, price, place, dan promotion*)
 - d. Mengukur seberapa besar target penjualan telah tercapai
 - e. Untuk bidang wisata akomodasi dan restoran, dilakukan upaya peningkatan kunjungan wisatawan.
 - f. Untuk bidang wisata pramuwisata, dilakukan strategi *branding* untuk mempopulerkan destinasi wisata Nias Selatan.

Hasil akhir dari serangkaian program terpadu tersebut di atas adalah terbentuknya pelaku wisata dalam empat bidang utama usaha wisata yang ada di Nias Selatan, yakni bidang akomodasi, bidang restoran, bidang usaha kerajinan, dan bidang jasa pramuwisata, yang mempunyai kompetensi memadai di bidang usaha mereka dan mempunyai jiwa wirausaha yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan usaha yang dinamis dan terus berubah.

4.3. Pengembangan Asosiasi Usaha Pariwisata

Pembentukan asosiasi usaha pariwisata dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu:

- 1) Pembentukan asosiasi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Nias Selatan
- 2) Pelaksanaan pertemuan rutin antar pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Nias Selatan

- 3) Pengembangan kemitraan antara asosiasi usaha pariwisata dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta (lembaga keuangan dan non keuangan) untuk pengembangan usaha pariwisata di Kabupaten Nias Selatan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Fasilitas dan infrastruktur pendukung masih sangat rendah, misalnya sering terjadinya pemadaman listrik, jalan yang kurang baik dan informasi pariwisata yang kurang lengkap. Mengingat pentingnya ketersediaan infrastruktur, menurut Dwi “dalam mendorong kualitas wisata itu sendiri, serta pada lingkungan sekitarnya dan tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah saja, tetapi juga pada bidang kepariwisataan”, maka perbaikan dan penyediaan infrastruktur kedepannya perlu mendapatkan perhatian secara intensif, karena “Daerah Tujuan Wisata yang ideal harus memiliki daya tarik wisata yang menarik, dan mempunyai ketersediaan infrastruktur yang memadai” (Dwi, 2005 dalam Rozy & Koswara, 2017), dengan demikian dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung semakin meningkat. Mengingat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan dengan diberlakukannya MEA, maka batas antar negara semakin bukan menjadi hambatan pergerakan wisatawan. Kebijakan Pemerintah dan Pemda dalam mengembangkan pariwisata, terutama wisata berbasis budaya dan alam juga semakin memicu peluang pengembangan sektor pariwisata.

Di sisi lain, ancaman perkembangan pariwisata daerah adalah bahwa daerah lain dan negara-negara ASEAN juga memiliki potensi wisata alam dan budaya dan mereka telah melakukan promosi wisata yang terintegrasi, misalnya yang dilakukan oleh Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Lombok Barat, Negara Malaysia, Thailand, dan Singapura. Berdasarkan analisis dapat dikelompokkan strategi pengembangan Kawasan Percontohan Ekonomi Inklusif Berbasis Pariwisata Teluk Dalam–Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan produk usaha pariwisata Kabupaten Nias Selatan
- 2) Peningkatan promosi wisata Kabupaten Nias Selatan ke dalam dan luar negeri
- 3) Pemberdayaan pelaku usaha wisata di Kabupaten Nias Selatan
- 4) Peningkatan pelaku usaha wisata pada akses teknologi informasi
- 5) Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha wisata, pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan asosiasi usaha
- 6) Peningkatan peran Pemerintah Daerah membangun infrastruktur pendukung pariwisata

5.2. Saran

Pembangunan kawasan ekonomi inklusif berbasis pariwisata, Teluk Dalam, Nias Selatan – Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, dalam mengentaskan kemiskinan yang dilakukan dengan menumbuhkan iklim usaha pariwisata, UMKM, di destinasi

pariwisata, dengan mendorong peran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi secara penuh. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator pada pembangunan kawasan ekonomi inklusif berbasis pariwisata, Teluk Dalam, Nias Selatan – Sumatera Utara Terkait dengan kepariwisataan dan komponen pariwisata pada destinasi wisata, sehingga dapat menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya yang dapat dilakukan melalui Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif di berbagai sektor, sehingga dapat mendorong kualitas wisata dan destinasi wisata terutama adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik yang diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku usaha maupun wisatawan yang berkunjung, sehingga dapat menarik dan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artis, D. (2018). *Paradigm of Ecotourism-Based Tourism Development in Context of Regional Economic Development Acceleration*. 1(3), 1–8.
- Delita, F., Yetti, E., & Sidauruk, T. (2017). Analisis Swot Untuk Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Mual Mata Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Geografi*, 9(1), 41. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6037>
- Hindersah, H., Asyiwati, Y., Akliyah, L. S., & Ramadhan, T. A. (2017). Tantangan Pembangunan Pariwisata Inklusif Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi – Provinsi Jawa Barat. *Prosiding-Seminar-Nasional-Perencanaan-Pembangunan-Inklusif-Desa-Kota*, 125–134. Retrieved from <http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota>
- Muhammad, F. (2018). Pesona Kearifan Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 301. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-05>
- Risman, A., Wibhawa, B., & Fedryasyah, M. (2016). Kontribusi Pariwisata Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–154.
- Rozy, E. F., & Koswara, A. Y. (2017). Karakteristik Infrastruktur Pendukung Wisata Pantai Sanggar Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), A651–A655. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.25197>
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23–35.
- Siwage Dharma Negara. (2013). Membangun Perekonomian Indonesia Yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 247–262. Retrieved from <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/view/319/190>

- Sutjipto, H. (2014). Analisis Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), 1–13.
- Syaparuddin, & Artis, D. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(3), 1–13.
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2), 207–232. <https://doi.org/10.14203/JMB.V17I2.283>